



KLIPING DIGITAL

KABUPATEN PADANG PARIAMAN

KUMPULAN BERITA MEDIA CETAK



SUHATRI BUR,SE,MM
BUPATI PADANG PARIAMAN

Drs. RAHMANG,MM
WAKIL BUPATI PADANG PARIAMAN



Angka Stunting di Padangpariaman masih Tinggi Kecamatan Lubuk Alung Mendominasi

PDG. PARIAMAN, METRO

Angka Stunting di Padang Pariaman Tahun 2023 masih tergolong tinggi yaitu diangka 22 persen. Kecamatan Lubuk Alung merupakan salah satu Kecamatan yang termasuk tinggi untuk Kabupaten Padang Pariaman. Berdasarkan data tersebut dalam rangka pelaksanaan Tri Darma Perguruan Tinggi beberapa dosen dari Departemen Keperawatan dan Psikologi Universitas Negeri Padang mengadakan kegiatan pelatihan kader Posyandu untuk membantu percepatan penurunan kejadian Stunting melalui penggunaan Aplikasi Anti Stunting. Aplikasi ini berisikan edukasi yang ditujukan kepada suami ibu yang sedang hamil. Kegiatan ini dilaksanakan Di Nagari Balah Ili Kecamatan Lubuk Alung pada hari Jumat Tanggal 24 Agus-

tus 2023.

Menurut Ketua Pelaksana Pengabdian Dr Hj. Erpita Yanti SKM, MMKes, kegiatan pelatihan kader dengan tema "Pelatihan Kader Posyandu dalam Kegiatan Implementasi Aplikasi Anti Stunting untuk Percepatan Penurunan Stunting di Kabupaten Padang Pariaman".

Hal ini terlaksana berkat adanya kerjasama yang baik antara nagari dengan Departemen Keperawatan Fakultas Psikologi dan Kesehatan. Tujuan pelatihan ini adalah untuk memberdayakan kader Posyandu sebagai ujung tombak dalam upaya percepatan penurunan Stunting.

Pencegahan stunting sudah seharusnya dimulai dari awal kehamilan hal ini tentunya tidak lepas dari peran suami dalam tugas dan fungsinya sebagai kepala keluarga yang juga berperan dalam perawatan

Kesehatan keluarga khususnya istrinya yang sedang dalam Kondisi hamil. Beberapa permasalahan yang ditemukan berkaitan dengan masih rendahnya pemahaman Suami dalam hal asuhan kehamilan dan perawatan kehamilan hal ini disebabkan karena pemahaman suami sebagai kepala rumah tangga sebagai pencari nafkah dan kurang terpapar dengan pengetahuan tentang Stunting atau anak pendek.

Menurutnya ibu hamil membutuhkan rasa aman dan nyaman selama proses kehamilan dan ini tentunya membutuhkan dukungan dari suaminya. Kejadian stunting pada Balita dikarenakan asupan gizi yang kurang saat hamil, pola makan yang tidak sesuai, serta kualitas makanan yang rendah sehingga mengakibatkan terhambatnya pertumbuhan.

Untuk itu diperlukan upaya yang efektif dalam penyampaian edukasi kepada masyarakat terutama suami dari ibu hamil agar berperan aktif dalam asuhan kehamilan. Partisipasi tokoh masyarakat dan kader Posyandu sangat diharapkan turut berperan serta dalam kegiatan pencegahan kejadian Stunting sebagai tanggung jawab masyarakat dalam menggalang sumber daya dan potensi masyarakat yang bertujuan untuk kepentingan bersama, keikutsertaan masyarakat dalam proses pengidentifikasian masalah dan potensi yang ada di masyarakat dalam upaya mengatasi masalah.

Dikatakannya, kurangnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang stunting dan dampak negatif yang akan timbul dari stunting merupakan salah satu penyebab ber-

tambahnya kejadian stunting di Kabupaten Padang Pariaman, kurangnya pengetahuan masyarakat tentunya akan menjadi kendala dalam mencegah kejadian dini stunting.

Kegiatan pelatihan ini didukung oleh anggota pengabdian Dr Yessy Aprihatin, SKM, MMKes dari Departemen Keperawatan, Suci Rahmania dari Departemen Psikologi dan bersama 4 orang mahasiswa Keperawatan Putri, Randy, Aldo dan Panji.

Sejalan dengan itu Wali Nagari Balah Ili melalui Sekretaris Nagari Rahmanul Hidayat menyampaikan bahwa Nagari Balah Ili Lubuk Alung melakukan pelatihan kader kesehatan bekerjasama dengan Dosen Fakultas Psikologi dan Kesehatan UNP dalam bentuk pengabdian dosen pada masyarakat. Dengan lahirnya Peraturan Pres-

iden (Perpres) Nomor 72 Tahun 2021 menjadi dasar dalam Percepatan Penurunan Stunting.

"Perpres ini juga memperkuat penerapan Strategi Nagari dalam Percepatan Penurunan Stunting tahun 2023 yang bertujuan untuk menurunkan prevalensi stunting, meningkatkan kualitas persiapan kehidupan berkeluarga, menjamin pemenuhan asupan gizi, memperbaiki pola asuh, meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan serta meningkatkan akses air minum dan sanitasi," ungkapnya.

Ia mengatakan, percepatan penurunan stunting harus dilaksanakan secara holistik, integratif, dan berkualitas melalui koordinasi, sinergi, dan sinkronisasi di antara nagari bersama pemerintah daerah provinsi, pemerintah

daerah kabupaten, dan pemerintah kabupaten.

Ditingkat nagari telah melaksanakan posyandu balita dengan mengedukasi ibu hamil dan menyusut tentang bagaimana cara mengetahui penyebab anak menjadi Stunting, memenuhi asupan gizi murah baik secara mandiri maupun pemberian makan tambahan (PMT) yang disediakan di setiap dilaksanakannya posyandu dan bagaimana menghadapi 1000 HPK pada anak dibawah binaan bidan desa Titik Sra Rahayu. "Mudah mudahan kegiatan pelatihan kader ini berjalan dengan baik dan lancar, kami berharap pada ibu dosen agar kegiatan dan kerjasama ini tetap berlanjut kedepannya sehingga masyarakat juga mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang pencegahan dini stunting," pungkasnya. (tozi)



KLIPING BERITA

PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

POSMETRO PADANG

Kamis 07 September 2023

Membangun Perempuan Berdaya Wujudkan Padangpariaman Berjaya, Diseminasi dan Sinergi Bagi GOW

PADANGPARIAMAN, METRO

Wakil Bupati Padangpariaman Rahmang mengungkapkan terima kasih dan apresiasinya atas terselenggaranya kegiatan Diseminasi dan Sinergi bagi Gabungan Organisasi Wanita (GOW) se Kabupaten Padangpariaman.

"Diseminasi dan sinergi ini dapat meningkatkan peran dan keterlibatan organisasi wanita dalam pemberdayaan perempuan. Perempuan memiliki peranan penting dalam pembangunan. Perempuan yang berdaya akan melahirkan peradaban yang hebat," kata Wakil Bupati Padangpariaman Rahmang, kemarin, usai acara diseminasi dan Sinergi bagi Gabungan Organisasi Wanita (GOW) se Kabupaten Padangpariaman.

Pemerintah Kabupaten Padangpariaman melalui Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A) Kabupaten Padangpariaman, kemarin, menyelenggarakan kegiatan Diseminasi dan Sinergi bagi Gabungan Organisasi Wanita (GOW) se Kabupaten Padangpariaman.

"Kegiatan yang mengusung tema membangun perempuan berdaya untuk mewujudkan Padangpariaman berjaya," kata Rahmang.

Sementara Ketua TP-PKK Padangpariaman Yusrita Suhatri Bur mengatakan, kegiatan diseminasi yang diselenggarakan ini merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan keterlibatan perempuan dalam pembangunan.

"Perempuan yang berdaya mampu berkontribusi terhadap pembangunan, mulai dari ruang lingkup terkecil di keluarga, komunitas, dan Kabupaten Padang Pariaman secara keseluruhan," ujarnya.

Sedangkan Ketua GOW Padangpariaman Yusnelly Rahmang apresiasi kepada jajaran Dinsos P3A atas terselenggaranya kegiatan yang menyoar GOW se-Kabupaten Padangpariaman tersebut.

Ia selaku Ketua GOW mengaku antusias. Ia berharap kegiatan yang dilaksanakan dapat membuka wawasan dan melahirkan perempuan berdaya yang mandiri dalam segala hal.

"Bagaimana organisasi wanita itu benar-benar mampu, mandiri, dan matang, sehingga dapat mengambil andil yang besar dalam mewujudkan Padangpariaman berjaya," tambahnya.

Hadir sebagai narasumber Ketua I Badan Kerja Sama Organisasi Wanita (BKOW) Provinsi Sumbar Ely Ditra. Sebelumnya, juga dilaksanakan sosialisasi terkait pemberdayaan perempuan oleh Kepala Dinas Sosial P3A Sumarni.

Kegiatan yang berlangsung selama 1 (satu) hari ini dihadiri oleh seluruh anggota GOW Padangpariaman, yakni Bundo Kandung, Persit, Bhayangkari, Ikatan Adhiyaksa Darma Karini, Darma Yukti Karini, Dharma Wanita Persatuan, IBI, Aisiyah, IGTKI, Salimah, Isbanda, dan Katalia. (efa)



PADANG EKSPRES

Kamis 07 September 2023

Pemilik Lahan Tol Tolak Eksekusi

Mengaku Dirugikan Miliaran Rupiah

Padangpariaman, Padak— Eksekusi terhadap lahan milik Sudirman untuk pembangunan Tol Padang-Pekanbaru di Nagari Buayan, Kecamatan Batangnani, kemarin, menuai penolakan dari pihak PT Zulia Mentawai Rik. Pasalnya, mereka menganggap eksekusi tersebut hanya keputusan sepihak. Sehingga, mereka dirugikan hingga puluhan miliar rupiah.

Pantauan *Padang Ekspres*, saat dimulainya eksekusi tim kuasa hukum PT Zulia Mentawai Rik, berdebat sengit dengan Juru Sita Pengadilan Negeri Pariaman, Syahril. Sebab, mereka menganggap tidak diberitahu saat eksekusi akan dilaksanakan.

"Kami tahu eksekusi ini akan dilakukan. Makanya kami datang ke sini sejak tadi pagi. Tapi pas eksekusi akan dilakukan, kenapa pembacaan berita acara eksekusinya tidak menghadirkan kami," ujar salah seorang kuasa hukum PT Zulia Mentawai Rik, Mahardi Andriantata, kepada awak media.

Padahal, sambungnya, saat pihak PN Pariaman mengeksekusi pagar lahan, pihaknya berada di dalam lahan tersebut. Bahkan juga ada kliennya selaku pemilik lahan. "Orang-orang kami ada dekat pagar itu, kenapa tidak mereka (pihak PN Pariaman, red) beritahu agar memanggil kami untuk mendengarkan berita acara eksekusi," sambungnya.

Mahardi menduga, tindakan itu sengaja dilakukan karena pihak eksekutor sudah mengetahui penolakan terhadap eksekusi tersebut. "Ya, klien kami lebih menolaknya eksekusi ini



MASALAH PEMBEBASAN LAHAN: Alat berat memulai proses eksekusi di lahan milik Sudirman, kemarin. Proses eksekusi tersebut mendapat penolakan dari pihak PT Zulia Mentawai Rik, lantaran ganti rugi atas material tambangnya di lahan itu tidak dibayarkan oleh pemerintah.

karena hanya keputusan sepihak yang dipaksakan. Sehingga, klien kami dirugikan miliaran rupiah," ungkapnya.

Kerugian yang dimaksudnya tersebut, yaitu menyangkut adanya ganti material tambang di lahan tersebut. "Jadi ceritanya itu, selain ganti rugi atas lahan yang digunakan untuk tol, ada juga material tambang yang mesti diganti rugi di lahan tersebut," ujarnya.

Nilai ganti rugi atas material tersebut, sambungnya, mencapai sekitar Rp 32 miliar. "Ini bukan nilai yang dipatok oleh klien kami. Namun, berdasarkan perhitungan tim appraisal. Dan itu sudah diverifikasi untuk dilakukan pembayarannya," ungkap Mahardi.

Namun tanpa adanya kejelasan, tiba-tiba hasil penilaian dan data hasil verifikasi atas material itu dihilangkan. Sehingga, yang diganti rugi hanya lahan milik kliennya. "Sudah jelas klien kami tidak mau menyetujui dan

ti kerugian lahan itu," imbuhnya.

Pasalnya, lanjut Mahardi, apabila kliennya bersedia mengambil ganti kerugian lahan yang sekarang ditidipkan di PN Pariaman, pihaknya mengendus adanya potensi kecurangan. "Kalau klien kami menerima ganti rugi lahan itu, kuat dugaan itu bisa dimanfaatkan oleh oknum-oknum untuk pencairan ganti kerugian material tambang tersebut," hematnya.

Untuk itu, kendati eksekusi telah dilakukan, pihaknya tidak mempermasalahkan hal tersebut. Namun, mereka sudah mengajukan perlawanan (gugatan) hukum, atas ganti rugi material tambang itu. "Klien kami tidak menolak pembangunan tol ini. Bukti, belum ada ganti rugi saja, sudah dilakukan pembangunan di lahan klien kami," tegasnya.

"Jadi, kami menegakkan di sini untuk keadilan hukum terhadap klien kami. Sehingga klien kami tidak dirugikan," tukas Mahardi yang

didampingi rekan-rekannya, yaitu H Mulyadi dan Ibrahimy R.

Sedangkan Juru Sita PN Pariaman, Syahril, yang dikonfirmasi awak media usai eksekusi lahan untuk pembangunan tol tersebut, mengatakan bahwa pihaknya sudah menjalani prosedur eksekusi sesuai ketentuan.

"Sejak permohonan eksekusi ini masuk ke pengadilan, kami sudah melakukan melakukan amaning. Kami panggil pihak termohon datang ke pengadilan, untuk memberitahukan agar mengosongkan lokasi yang akan dieksekusi dalam waktu 8 hari," paparnya.

Hanya saja, sambungnya, hingga eksekusi dilakukan, permohonan eksekusi tidak melakukan pengosongan lokasi tersebut. "Namun permohonan eksekusi tetap melakukan eksekusi secara paksa, dengan mengajukan permohonan eksekusi. Sehingga, kami lakukan eksekusi hari ini (kemarin)" jelasnya

Menyangkut eksekusi yang dianggap pihak termohon melanggar aturan, menurutnya hal itu kesalahan informasi. "Jelang dimulainya eksekusi, kami sudah mengabsen pihak termohon dan permohonan eksekusi sebanyak tiga kali. Kami panggil tetap tidak ada (pihak termohon, red), makanya kami minta izin kepada pak wali korong dan wali nagari untuk dibacakan berita acara penetapan eksekusi ini," tukasnya.

Dahulukan UU Minerba
Informasi yang dihimpun *Padang Ekspres* di lapangan, menyangkut gugatan pihak PT Zulia Mentawai Rik tentang ganti kerugian material tambang di lahan milik Sudirman Cs tersebut, masih dapat dilakukan ganti kerugian oleh pemerintah. Hal itu lantaran merujuk dari Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 Pasal 33 Ayat 3, yang berbunyi: "Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat".

Pengamat Hukum dari Universitas Andalas, Prof Ismansyah, memandang bahwa hal itu tidak dapat sepenuhnya langsung menjadi klaim pemerintah. Maka dari itu, menaruhnya dalam proses pembebasan lahan yang di dalamnya terdapat kekayaan mineral (mineral dan batubara) termasuk tambang galian tipe c, harus mendahului prosesnya penyelesaian dari sudut pandang UU Minerba.

"Kalau langsung diputuskan sebagai milik negara, tentu dengan mudah saja pemerintah mencampok tanah ulayat yang ada di Minang ini. Jadi tidak begitu caranya," ungkapnya.

Langkah yang benar, menurutnya yaitu melakukan kajian dan penilaian sesuai UU Minerba terlebih dahulu. Sehingga, dapat diketahui dalam lahan itu sampai di mana yang bisa ditetapkan sebagai hak masyarakat atau ulayat. "Proses ini harus bebas dari intervensi untuk menilai hak-hak masyarakat di dalamnya," tukasnya.

Pembangunan Bisa Lanjut
Di sisi lain, pihak PT Hutama Karya Infrastruktur (HKI) sangat bersyukur PN Pariaman sudah melaksanakan eksekusi lahan tersebut. Sehingga, pembangunan ruas Tol Padang-Pekanbaru di Nagari Buayan tersebut dapat berlanjut lebih lancar.

"Ya memang pekerjaan sempat terhambat karena masalah lahan tersebut. Sebab itu akan menghubungkan ruas di Nagari Sibak dengan Buayan ini. Karena sudah dieksekusi, besok kita bisa langsung mulai bekerja di sana," ungkap Andi Prahmana, Petugas Pembebasan Lahan dan Hubungan Masyarakat PT HKI (ano)